

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pergeseran paradigma terhadap pemerintah saat ini, mendorong kita mewujudkan suatu sistem tata pemerintah yang baik (*good governance*), dengan jalan mewujudkan lahirnya tata pemerintahan yang demokratis dan diselenggarakan secara baik, bersih, transparan, partisipatif, serta akuntabilitas.

Perwujudan *good governance* memerlukan perubahan paradigma pemerintah baru yang mendasar dan menuntut suatu sistem yang mampu memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi secara regional, nasional maupun internasional yang bukan hanya menjadi pemerintah daerah yang terus menerus bergantung pada pemerintah pusat.

Dalam mewujudkan suatu sistem tata pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya perubahan dibidang akuntansi pemerintah karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan untuk berbagai pihak. Perubahan dibidang akuntansi harus berdasarkan dengan suatu dasar yang kuat yaitu dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Dengan diterbitkannya PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan dan yang di harapkan dapat menjadi acuan, patokan serta standar untuk diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah yang wajib untuk menyajikan laporan keuangan agar lebih terciptanya akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Peraturan ini menjadi pedoman yang harus di taati oleh setiap Daerah Otonom Kabupaten/Kota maupun provinsi dalam menyajikan laporan keuangan berbasis akrual pada pemerintah daerahnya. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bekasi sebagai

pengguna anggaran juga wajib membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai PP No. 71 Tahun 2010 dan PERMENDAGRI No. 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah.

Sejalan akan diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dengan direvisinya PP No. 24 Tahun 2005 menjadi PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun 2015.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2014-2015 studi kasus di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ?
2. Apakah kendala yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Menerapkan PP No. 71 tahun 2010 basis akrual ?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah Kota Bekasi dalam menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Objek

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi Pemerintah Kota Bekasi sebagai objek penelitian mengenai penerapan SAP berbasis akrual, dan mempelajari kendala yang di hadapi dalam melaksanakan penerapannya.

2. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh peran audit internal terhadap perusahaan dengan mengefektifkan sistem informasi akuntansi.

3. Bagi Pembaca

Dapat digunakan sebagai salah satu bacaan dan ilmu pengetahuan tentang analisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dalam penyajian Laporan Keuangan.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Agar masalah yang dibahas tidak terlalu luas dan sesuai dengan penelitian yang dibahas maka dibuat batasan masalah hanya mengenai analisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi tahun 2015 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan penulis membagi 5 bagian pembahasan, yaitu :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini akan menjelaskan teori yang digunakan sebagai dasar acuan teori bagi penelitian, penelitian-penelitian terdahulu, kutipan buku yang berupa pengertian dan definisi dan kerangka pemikiran.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menjelaskan mengenai desain penelitian, tahapan penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, metode analisis data.

## **BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, data dan pembahasan

## **BAB V : KESIMPULAN**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan memberikan saran berupa masukan kepada pihak instansi yang terkait.